

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan potensi ekonomi lokal merupakan proses dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat yang relevan untuk mendorong aktivitas usaha untuk menambah lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya adalah dengan adanya peran dari pemerintah daerah dalam penentuan arahan dan strategi dalam pembangunan ekonomi daerah (Puspitasari & Ufitri, 2022). Pembangunan ekonomi daerah adalah upaya pengolahan berbagai jenis sumber daya berpotensi yang berada di suatu daerah. Mengidentifikasi potensi ekonomi lokal di suatu daerah menjadi tahap pertama dalam merancang pembangunan ekonomi daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan kebijakan supaya dapat mencapai tujuan yang tepat (Widodo, 2006). Kebijakan mengenai rencana pembangunan suatu daerah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA), dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1.708.830 jiwa sangat memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan, baik dari sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Semarang dengan visi “terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-bhineka tunggal ika” memiliki misi salah satunya adalah dengan meningkatkan

potensi ekonomi lokal yang berdaya saing stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila. Kota Semarang menerapkan pengembangan kawasan strategis untuk mengembangkan daerah dengan mengunggulkan potensi dari suatu kawasan. Kawasan strategis memiliki artian yaitu kawasan tersebut memiliki kegiatan yang memengaruhi tata ruang di wilayah sekitarnya, dan memiliki kegiatan yang dapat menyejahterakan penduduk di kawasan tersebut. Pengembangan Kawasan strategis dapat dioptimalkan melalui sektor ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan hidup. Beberapa Kawasan di Semarang menjadi strategis untuk pengembangan ekonomi, pengembangan aktivitas sosial budaya, pengembangan teknologi, dan pengembangan lingkungan hidup. Kawasan strategis memiliki potensi besar dalam mengembangkan suatu aktivitas yang terkonsentrasi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031, ditetapkan kawasan strategis di Kota Semarang salah satunya adalah kawasan strategis sektor ekonomi.

Posisi strategis yang dimiliki Kota Semarang tentunya mempengaruhi aktivitas perdagangan dan jasa penduduk Kota Semarang. Sebagai kota yang menjadi kawasan perdagangan dan jasa, Kota Semarang tidak terlepas dari pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. RTRW tahun 2011-2031 menetapkan dua wilayah strategis untuk pengembangan ekonomi di Kota Semarang. Kawasan strategis ekonomi yang pertama adalah Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas adalah Pelabuhan yang melayani pelayaran nasional dan internasional. Pelabuhan ini memiliki kontribusi besar terhadap manuver barang dan jasa yang melintas melalui lautan. Banyaknya

aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Emas mendorong munculnya *multiplier effect* yang luas. Kawasan strategis ekonomi yang kedua berada di Kawasan Peterongan-Tawang-Siliwangi (Petawangi). Kawasan segitiga Petawangi memiliki potensi di sektor ekonomi yang besar. Aktivitas perdagangan dan jasa sangat mendominasi di kawasan segitiga ini, terdapat banyak perhotelan dan pusat perdagangan didukung dari keberadaan Stasiun Tawang yang menjadi pintu gerbang kedatangan di Kota Semarang (RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026).

Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Semarang sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021, diberikan pemaparan mengenai pelaksanaan pembangunan pada misi “Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang berprioritas pada; program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program perencanaan dan pembangunan industri, dan program pemberdayaan *startup* lokal. Pengelolaan kawasan ekonomi strategis merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal. Kawasan-kawasan strategis seperti Peterongan ditargetkan untuk menjadi sentral aktivitas ekonomi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan Kawasan strategis berperan penting dalam mengatasi kemiskinan karena dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang dari tahun 2022-2024 yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Semarang	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2022	2023	2024
Kota Semarang	79,87	80,53	77,79

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Data diatas menunjukkan masih adanya penduduk miskin di Kota Semarang walaupun banyak kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Semarang. Dari data tersebut ditunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Secara etimologis, “miskin” memiliki artian tidak berharta benda dan serba berkekurangan. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan yang layak (BPS dan Depsos, 2002). Pembangunan ekonomi daerah dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan ekonomi daerah yang tidak terlaksana dengan menyesuaikan potensi dari masing masing wilayah mengakibatkan sumber daya yang ada dimanfaatkan secara kurang optimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi sebuah proses yang lambat. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa tidak lepas dari setrategi pertumbuhan ekonomi, Kota Semarang telah menetapkan kawasan pengembangan ekonomi yaitu Pemuda_Pandanaran-Gajahmada (Padma), Peterongan-Tawang-Siliwangi (Petawangi), dan Pelabuhan Tanjung Emas (RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026).

Wilayah Peterongan sendiri merupakan pengelolaan ekonomi yang masuk dalam kawasan pengembangan ekonomi Peterongan-Tawang-Siliwangi (Petawangi), berkonsentrasi pada pengembangan sektor-sektor yang sudah ada, seperti perdagangan dan jasa, dan menciptakan industri kreatif dan pariwisata baru yang berpotensi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang, wilayah Peterongan memiliki pusat perekonomian yang berfokus pada Pasar Peterongan. Peterongan memiliki potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dioptimalkan dengan baik. Pemerintah Kota Semarang telah berkomitmen dengan salah satu misi yang ditetapkan yaitu “meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing stimulasi Pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Peningkatan potensi ekonomi di Peterongan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan memajukan perekonomian daerah secara menyeluruh.

Masih terdeteksinya kemiskinan di daerah strategis Peterongan, membuat penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi yang seharusnya digunakan oleh pemerintah dalam mengelola kawasan ini. Kawasan Peterongan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa yang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Sumber ekonomi yang berada di Peterongan meliputi; UMKM, hotel, *coffeeshop*, restoran, pasar tradisional, bahkan *mall*.

Banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul dari sumber ekonomi tersebut mendatangkan berbagai pekerja yang tidak hanya berasal dari Peterongan saja,

terdapat banyak pekerja yang berasal dari luar wilayah Peterongan bahkan luar Semarang. Hal ini menambahkan potensi untuk meningkatkan ekonomi dan juga menguntungkan pelaku usaha kos kosan dan membuka peluang bagi warga sekitar Peterongan yang ingin membuka usaha kos kosan. Pelaku usaha *laundry* di Kawasan Peterongan juga diuntungkan dengan banyaknya kos kosan yang berada di sekitarnya.

Berdasarkan data dari website (Kelurahan Peterongan, 2024), masih dijumpai warga miskin di wilayah RT 02 dan 03 RW 06. Pemerintah Kota Semarang memiliki peran yang krusial dalam mensejahterakan masyarakat. Keberadaan warga miskin yang terbilang belum sejahtera di Kawasan ekonomi strategis perlu dipertanyakan bagaimana pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang sangat luas untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan kekayaan dari potensi daerah tersebut. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonominya termasuk dalam menghadapi kendala yang berada di daerah tersebut. Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi.

Tabel 1. 2 Anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2024 untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021'	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Mini 2.	MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA					223.068.316.000		200.934.452.000		321.478.941.000

(Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026)

Fungsi pemerintahan dalam peningkatan ekonomi lokal salah satunya di kawasan ekonomi strategis sangat dibutuhkan dan melibatkan berbagai peran strategis yang dapat membantu pengoptimalan potensi sumber daya daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini termasuk memungkinkan investasi, memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah (UKM), dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menggerakkan bisnis. Pemerintah, misalnya, dapat memulai program hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal (Kemenko PMK, 2024). Berdasarkan tabel yang diambil dari RPJMD Kota Semarang, tertulis mengenai anggaran yang diberikan untuk peningkatan potensi ekonomi di Kota Semarang, namun anggaran tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemetaan wilayahnya.

Bangunan Pasar Peterongan masih berdiri hingga sekarang, sebelum dilakukan revitalisasi pasar, dapat terbilang kondisi Pasar Rakyat Peterongan sangat tidak layak dan memprihatinkan. Namun, DPRD menilai pasar tradisional Peterongan direvitalisasi oleh kontraktor secara asal-asalan (Jibi, 2017). Anggaran yang dikeluarkan untuk revitalisasi menyentuh angka 30 juta dengan harapan tercipta lingkup pasar baru yang layak ditempati dan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Dengan anggaran yang dikeluarkan, masih ditemukan banyak celah

kesalahan dari adanya atap yang bocor, dan saluran air yang mampet sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini membuat pengunjung tidak nyaman dan pedagang merasa dirugikan karena omset pedagang stagnan bahkan turun per harinya. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Pasar Peterongan menunjukkan bahwa pasar sudah "tidak layak". Ini disebabkan oleh fakta bahwa bangunan pasar digunakan sebagai tempat tinggal para gelandangan, kurangnya fasilitas sarana karena ruang rembug pedagang telah digunakan sebagai tempat tinggal gelandangan sehingga pedagang tidak memiliki ruang untuk penataan tentang pengelolaan pasar, dan kurangnya ruang parkir, yang menyebabkan kondisi parkir tetap tidak teratur. Selain itu, pengelolaan tidak efisien karena Dinas Pasar hanya menggunakan dana APBD saat pasar rusak parah. Pemerintah tidak melakukan apa pun untuk memelihara pasar (Antara Jateng, 2014).

Program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah proyek pemugaran pasar, revitalisasi Pasar Peterongan sudah dilakukan oleh pemerintah tahun 2017 silam walaupun sempat tertunda pada tahun 2016. Namun, proyek pemugaran revitalisasi pasar Peterongan ini terbilang gagal. Menurunnya pengunjung di pasar tradisional menggerakkan Pemerintah Kota Semarang untuk tetap menjaga eksistensi dari pasar tradisional (Fitriana, dkk, 2020). Pasar tradisional Peterongan atau Pasar Rakyat Peterongan dibangun pada sekitar tahun 1916 (Anas, 2020). Pasar tradisional adalah pusat ekonomi masyarakat. Tempat dimana dilakukan transaksi ekonomi, seringkali transaksi dilakukan dengan jual-beli langsung dan sistem tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional berisi toko,

kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, kelompok masyarakat. Proses jual beli barang dagangan dilakukan melalui tawar menawar (Perda Kota Semarang No 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional). Pedagang di pasar biasanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, seperti telur, daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kain, pakaian, barang elektronik, dan sebagainya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu penyokong dalam penyusunan penelitian ini;

- a. Dayat NS Wiranta, 2015. Dengan penelitian berjudul “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”. Penelitian oleh Dayat NS Wiranta ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sama seperti yang digunakan oleh peneliti ini dalam penyusunan penelitian penulis. Penelitian Dayat memiliki kesamaan dalam penggunaan teorinya, teori pembangunan sama sama digunakan dalam penelitian penulis dan Dayat. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada lokus penelitiannya. Penelitian Dayat menganalisis ASEAN, sedangkan penelitian penulis memiliki lokus di Peterongan Kota Semarang. Hasil dari penelitian Dayat mengidentifikasi bahwa MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) memberikan peluang bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal

melalui intergrasi pasar dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang berada di ASEAN.

- b. Nopi, Aimie Sulaiman, Sujadmi, 2021, yang berjudul “Optimalisasi Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Gunung”. Penelitian oleh Nopi, dkk ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian penulis yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaan dari penelitian Nopi, dkk dengan penelitian penulis terletak pada potensi lokal yang diteliti. Pada penelitian Nopi, dkk memiliki fokus pengembangan potensi daerah seperti hasil kebun dan laut. Sedangkan penelitian yang disusun oleh peneliti berfokus pada potensi yang dapat memunculkan pengembangan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian Nopi, dkk ini ditemukan beberapa Upaya yang dilakukan dalam optimalisasi potensi lokal di Desa Tanjung Gunung yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat (tahap penyadaran), memberikan pelatihan kepada masyarakat (tahap pengkapasitasan) dan masyarakat sendiri yang sudah memiliki kemampuan membuat panganan lokal yang dalam hal ini disebut sebagai tahap pendayaan oleh Ayub.
- c. Adilah dan Nandis, 2022, yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi lokal melalui Sektor Perikanan Tangkap (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan). Teknik pengumpulan data pada penelitian Adilah dan Nandis dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Adilah dan Nandis menggunakan kepercayaan untuk mengecek keabsahan data, Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Perbedaan penelitian Adilah dan Nandis dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang terletak pada sektor perikanan tangkap, sedangkan penelitian penulis meneliti ke sektor yang lebih banyak dan general. Hasil penelitian Adilah dan Nandis menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap yaitu sebagai *entrepreneur* yaitu sebagai pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi, sebagai koordinator yaitu mengkoordinir semua lembaga termasuk *stakeholders*, sebagai fasilitator yaitu memberi bantuan seperti alat tangkap dan alat pengolah pengusaha perikanan, sebagai stimulator yaitu dalam mempercepat pengembangan ekonomi melalui pameran pengolah hasil perikanan.

- d. Hilya Usrotun Putri Diaz, Rendy Sueztra Canaldhy, Novia Kencana, 2019, yang berjudul “Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal pada Industri Batu Bata(Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kec.Ujanmas Kabupaten Muara Enim)”. Penelitian Hilya, dkk ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Hilya, dkk ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang juga sama digunakan oleh peneliti dalam

penyusunan penelitian penulis. Perbedaan penelitian Hilya, dkk dan penelitian penulis yaitu penelitian Hilya dkk menganalisis kinerja dari Pemerintahan Desa, sedangkan penelitian penulis menganalisis kinerja dari Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian Hilya dkk menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan pemerintah desa yakni: 1)meningkatkan permodalan dan peminjaman modal untuk pengusaha industri; 2)memperluas jaringan pemasaran batu bata dengan mempromosikan melalui media sosial maupun media cetak sebagaipenunjang pengembangan industri batu bata tersebut; 3)meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan cara lebih banyak melakukan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja yang tersedia; 4)mensosialisasikan dan mendaftarkan pemilik industri batu bata yang belum terdaftar supaya terjamin legalitasnya serta mendapat perlindungan hukum dan meningkatkan Kerjasama dengan pihak ketiga maupun *stakeholder* untuk membantu keterbatasan permodalan dan keuangan.

- e. Nandang Mulyana, Hami Fauziyyah, Risna Resnawaty, 2017, yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Lokal Jatinangor melalui Wisata Edukasi”. Penelitian Nandang, dkk memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Namun penelitian Nandang, dkk hanya memiliki fokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui wisata edukasi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Hasil dari

penelitian Nandang dkk menemukan bahwa wisata edukasi memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal di Jatinangor. Ditunjukkan bahwa keberadaan perguruan tinggi di daerah tersebut menarik banyak pengunjung, terutama mahasiswa dan sekolah-sekolah yang ingin melakukan studi banding.

- f. Penelitian oleh Loso Judijanto, Stepanus Sandy, Desi Rahmi Yanti, Desi Kristanti, Mohamad Zulman Hakim, 2023, yang berjudul “Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Inovasi Teknologi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal”. Penelitian ini melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi lokal dapat didukung oleh pengembangan usaha kecil menengah (UKM) yang bergantung pada inovasi teknologi. Dengan meninjau literatur jurnal dan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana UKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka dengan menerapkan teknologi baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus dimasukkan ke dalam strategi pengembangan UKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas pasar, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Penemuan ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan publik dan praktik bisnis untuk meningkatkan peran UKM dalam menggerakkan ekonomi lokal. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan teknologi, berbeda dengan penelitian penulis. Namun,

Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki fokus yang samayaitu tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi lokal. Inovasi teknologi termasuk dalam salah satu faktor pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat dituang ke dalam pembahasan penelitian penulis.

- g. Penelitian oleh Klemens Mere, Muhammad Hery Santoso, Mutiasari, Herni Utami Rahmawati, Muhammad Ade Kurnia Harahap, (2023), yang berjudul “Peran Ekonomi Kreatif dalam Menggerakan Pertumbuhan Ekonomi Lokal”. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka atau studi pustaka. Tujuan dari metode ini adalah untuk membandingkan teori-teori terbaru dengan kerangka pemikiran yang ada dalam literatur penelitian sebelumnya. Berdasarkan analisis literatur yang dibahas di sini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan menjadi katalisator utama untuk inovasi dan pembuatan produk baru. Penelitian ini dapat membantu penelitian penulis dengan memasukan ekonomi kreatif sebagai salah satu fondasi dari pertumbuhan ekonomi lokal. Ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam memperlihatkan potensi lokal serta menciptakan peluang usaha di suatu daerah. Ekonomi kreatif menjadi pertimbangan penulis dalam pembuatan penelitian ini.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bagaimana regulasi dari pemerintah terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi di Peterongan. Ditemukannya masyarakat miskin menandakan bahwa kesejahteraan belum merata dan diperlukan evaluasi dalam pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Pemilihan Kawasan Peterongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kompleksitas permasalahan, khususnya dalam aspek pengelolaan kawasan dan aktivitas perdagangan. Penelitian yang dilakukan oleh Mira, Suzanna, dan Rukayah (2020) menunjukkan bahwa meskipun revitalisasi pasar telah meningkatkan kondisi fisik bangunan menjadi lebih tertata dan bersih, namun secara ekonomi justru terjadi penurunan pendapatan pedagang akibat menurunnya minat pengunjung pasca revitalisasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara intervensi kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi riil pedagang.

Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa desain bangunan dan penataan ruang pasar belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aktivitas pedagang. Beberapa pedagang bahkan memilih berjualan di luar area pasar karena desain kios dan los yang tidak sesuai dengan jenis dagangan serta keterbatasan fasilitas yang tersedia.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Peterongan tidak hanya memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi lokal, tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan serta hambatan dalam aktivitas perdagangan. Dengan demikian, kawasan ini menjadi lokasi yang relevan untuk

mengkaji proses *collaborative governance* serta hambatan pengembangan usaha pedagang, karena terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan kondisi riil yang dialami oleh pelaku usaha di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis Peterongan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pedagang dalam pengembangan usaha di Kawasan Peterongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis Peterongan.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pedagang dalam pengembangan usaha di Kawasan Peterongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi politik yang terinci bagi pemerintah daerah Kota Semarang mengenai peningkatan efektivitas program peningkatan potensi ekonomi lokal di Kawasan Peterongan Kota Semarang. Dengan adanya data empiris yang dikumpulkan dari penelitian ini, diharapkan bisa

membantu pemerintah Kota Semarang untuk desentralisasi dana APBD melalui prioritas program yang sesuai guna mengurangi kemiskinan di Peterongan.

Penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk pelatihan dan edukasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum guna meningkatkan kapasitas SDM pengelola usaha/UMKM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi calon investor untuk berinvestasi di kawasan ekonomi strategis Peterongan karena adanya data yang konkret mengenai potensi ekonomi yang tersedia di Peterongan.

1.4.2. Manfaat teoritis

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis tapi juga manfaat teoritis yang signifikan bagi akademisi dan praktisi di bidang ilmu pemerintahan serta pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini berkontribusi di bidang ilmu pemerintahan karena memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana pemerintahan melakukan intervensi dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal serta bagaimana pemerintah mengentas kemiskinan di suatu wilayah.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kawasan Ekonomi Strategis dan *Local Economic Development (LED)*

Kawasan ekonomi strategis merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsentrasi aktivitas ekonomi, investasi, dan pengembangan sektor unggulan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan wilayah secara lebih luas.

Menurut Farole dan Akinci (2022), perkembangan kawasan ekonomi strategis menunjukkan adanya evolusi karakteristik dari waktu ke waktu. Pada generasi awal, kawasan ekonomi seperti *Export Processing Zones (EPZ)* berfokus pada peningkatan investasi asing langsung dan ekspor, dengan keterkaitan yang relatif terbatas terhadap ekonomi lokal. Selanjutnya, kawasan ekonomi berkembang menjadi lebih luas dan bersifat multifungsi serta multisektoral, dengan keterkaitan yang lebih baik terhadap ekonomi lokal. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari kawasan yang bersifat eksklusif menuju kawasan yang lebih terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Farole dan Akinci (2022) juga menjelaskan bahwa kawasan ekonomi strategis memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas dan output ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ekonomi strategis berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah.

Sementara itu, menurut Dati (2023) dalam *Journal of Economics Research and Policy Studies*, keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai aktor utama dalam pengaturan kelembagaan, termasuk dalam hal perizinan, regulasi, serta pengelolaan tata ruang kawasan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi serta memastikan bahwa kawasan ekonomi dapat berkembang sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Naeem et al. (2020) yang dikutip dalam Dati (2023) menjelaskan bahwa KEK mampu memberikan dorongan terhadap industrialisasi berbasis ekspor di negara berkembang, sehingga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Namun demikian, Zeng (2016) dalam kajian yang sama juga menekankan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan KEK, seperti hambatan regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta masalah koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan *Local Economic Development* (LED) menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. LED berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan sektor ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam perspektif LED, pengembangan kawasan ekonomi strategis seharusnya mampu mendorong keterkaitan antara aktivitas ekonomi kawasan dengan potensi lokal, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, secara normatif, kawasan ekonomi strategis diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi ekonomi yang kuat.

Berdasarkan buku yang berjudul “*Planning Local Economic Development: Theory and Practice*” sebagai teori utama. Blakely dan Bradshaw memiliki tiga pendekatan yaitu:

1. Pengembangan ekonomi komunitas

Pendekatan ini berfokus pada mobilitas sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Selain ekonomi, tujuan seringkali bersifat sosial, menekankan kontrol lokal atas aset dan keuntungan ekonomi.

2. Pengembangan bisnis

Fokus utama pendekatan ini biasanya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan bisnis lokal, menarik investasi baru, dan mendukung kewirausahaan. Strategi ini biasanya melibatkan insentif fiskal, pengembangan infrastruktur, dan pemasaran lokal.

3. Pengembangan ekonomi strategis

Pendekatan ini melibatkan perencanaan yang menyeluruh dan jangka panjang, yang biasanya dipimpin oleh lembaga perencanaan regional atau pemerintah daerah. Ini mencakup pengenalan sektor-sektor penting, melakukan analisis keunggulan komparatif, dan membangun kolaborasi publik-swasta.

Pembangunan ekonomi lokal adalah upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam proses ini, pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat harus berpartisipasi dalam mendorong, mendorong, atau memelihara aktivitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Blakely, Bradshaw (1994) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan beberapa pihak, antara lain; pemerintah, dunia usaha, Masyarakat lokal dan organisasi Masyarakat

untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Blakely dan Bradshaw percaya bahwa LED adalah ketika pemerintah dan organisasi masyarakat lokal bekerja sama untuk mendorong usaha dan mempertahankannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

1.5.2 *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* berkembang sebagai pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang menekankan keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan secara bersama. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model pemerintahan yang bersifat top-down, yang dinilai kurang mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan publik.

Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor non-negara secara langsung dalam forum bersama dengan pemerintah, yang bersifat formal, berorientasi konsensus, serta bertujuan untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam konsep ini, pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, tetapi sebagai bagian dari jaringan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Ansell dan Gash (2007) mengembangkan model analisis *collaborative governance* yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *collaborative process*, dan *outcomes*. Keempat variabel ini digunakan untuk memahami bagaimana proses kolaborasi terbentuk, dijalankan, serta menghasilkan suatu kebijakan atau tindakan kolektif.

1. *starting conditions*, merujuk pada kondisi awal yang mempengaruhi terbentuknya kolaborasi, seperti ketimpangan kekuasaan antar aktor, tingkat kepercayaan awal, serta insentif untuk berpartisipasi. Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan antar aktor (*interdependence*) menjadi faktor penting dalam mendorong kolaborasi. Aktor cenderung terlibat dalam proses kolaborasi ketika mereka menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan secara mandiri. Selain itu, riwayat hubungan antar aktor, baik dalam bentuk konflik maupun kerja sama sebelumnya, juga mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, terutama dalam membangun atau menghambat kepercayaan.
2. *institutional design*, berkaitan dengan aturan main dalam proses kolaborasi, seperti mekanisme partisipasi, transparansi, serta kejelasan prosedur. Desain kelembagaan yang baik akan menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan mendorong keterlibatan aktor secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
3. *collaborative process*, menekankan pada dinamika interaksi antar aktor dalam forum kolaborasi. Proses ini meliputi dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, serta upaya mencapai pemahaman bersama. Dalam hal ini, Ansell dan Gash (2007) juga menekankan pentingnya kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) dalam menjaga keberlangsungan proses kolaborasi. Kepemimpinan ini berperan dalam membangun komunikasi, menjaga

keseimbangan kekuasaan, serta memastikan bahwa seluruh aktor dapat berpartisipasi secara setara .

4. *outcomes*, merujuk pada hasil dari proses kolaborasi, baik dalam bentuk kebijakan, kesepakatan, maupun dampak yang dihasilkan. Keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana hasil tersebut mampu menjawab permasalahan yang dihadapi serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan model tersebut, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi awal hingga dinamika interaksi antar aktor. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh adanya forum bersama, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar aktor, kejelasan aturan, serta kemampuan dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama.

Dengan demikian, kerangka *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana interaksi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis Peterongan. Keempat variabel dalam model ini menjadi dasar dalam mengkaji sejauh mana proses kolaborasi telah berjalan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan kawasan tersebut.

1.5.3 Hambatan Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Tradisional

Pengembangan usaha pedagang pasar tradisional tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul baik dari dalam maupun luar usaha itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi kemampuan pedagang dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang semakin dinamis.

Dalam penelitian ini, hambatan pengembangan usaha pedagang diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Klasifikasi ini digunakan untuk mempermudah analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pedagang dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam diri pedagang itu sendiri, baik yang berkaitan dengan kapasitas, kemampuan, maupun strategi dalam menjalankan usaha. Hambatan ini mencerminkan keterbatasan yang dimiliki oleh pedagang dalam merespons dinamika pasar. Kajian yang dilakukan oleh Susilowati (2014) menunjukkan bahwa lemahnya manajemen usaha serta kondisi infrastruktur pasar yang kurang memadai menjadi faktor yang menghambat daya saing pedagang tradisional. Lebih jauh lagi, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi menjadi salah satu hambatan yang cukup menonjol. Pedagang tradisional umumnya masih belum memanfaatkan sistem pembayaran digital maupun strategi pemasaran berbasis online, sehingga dinilai kurang efisien dan kurang menarik bagi konsumen. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan

adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan usaha

2. Hambatan Eksternal

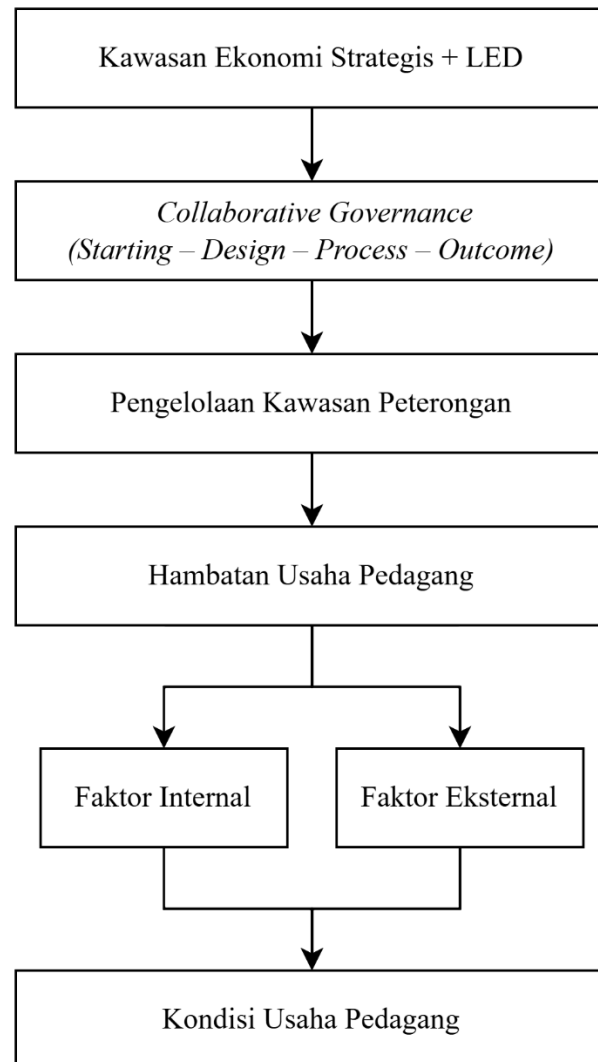
Dalam konteks persaingan, keberadaan pasar modern menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kondisi pedagang tradisional. Kajian yang dilakukan oleh Susilowati (2014) menunjukkan bahwa berkembangnya minimarket, supermarket, dan hypermarket telah berdampak pada penurunan pendapatan dan keuntungan pedagang pasar tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pedagang tradisional menghadapi tekanan eksternal yang cukup kuat akibat perubahan struktur pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga turut memperburuk kondisi pedagang pasar tradisional. Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih pasar modern karena faktor kenyamanan, kemudahan akses, serta kelengkapan produk menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang tradisional. Perubahan ini secara langsung berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung di pasar tradisional. Perkembangan teknologi digital juga menambah kompleksitas hambatan yang dihadapi pedagang. Dalam studi yang dilakukan oleh Arifin, Khairi, dan Rahman (2022), dijelaskan bahwa kehadiran e-commerce turut mempengaruhi minat pedagang konvensional untuk mempertahankan usahanya karena meningkatnya persaingan dengan pelaku usaha berbasis online. Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya peluang,

tetapi juga menjadi tantangan baru bagi pedagang yang belum mampu beradaptasi.

Dengan demikian, hambatan pengembangan usaha pedagang pasar tradisional dapat dipahami sebagai kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan kapasitas usaha seperti manajemen, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi persaingan dengan pasar modern dan e-commerce, serta perubahan perilaku konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep hambatan pengembangan usaha dalam penelitian ini digunakan untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi pedagang secara lebih komprehensif. Hambatan ini tidak secara langsung diposisikan sebagai kegagalan pemerintah, melainkan sebagai dinamika yang muncul dalam proses adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan lingkungan ekonomi yang terus berkembang.

1.6 Kerangka Berpikir



Pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis pada dasarnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi aktivitas ekonomi serta pemanfaatan potensi lokal. Dalam konteks ini, pendekatan *Local Economic Development* (LED) menekankan bahwa pengembangan kawasan ekonomi seharusnya mampu menciptakan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan potensi lokal, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan kawasan ekonomi strategis tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi ideal tersebut. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, yang masing-masing memiliki kepentingan dan kapasitas yang berbeda.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan kebijakan publik. Dalam kerangka ini, keberhasilan pengelolaan kawasan ekonomi strategis dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *collaborative process*, dan *outcomes*. Variabel *starting conditions* digunakan untuk melihat kondisi awal yang mempengaruhi terbentuknya kolaborasi, seperti ketimpangan kekuasaan, tingkat kepercayaan antar aktor, serta insentif untuk berpartisipasi. Variabel *institutional design* digunakan untuk menganalisis bagaimana aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan dibentuk, termasuk dalam hal transparansi dan keterlibatan aktor. Selanjutnya, variabel *collaborative process* digunakan untuk memahami bagaimana interaksi antar aktor berlangsung, terutama dalam hal komunikasi, pembangunan kepercayaan, serta komitmen dalam pengelolaan kawasan. Sementara itu, variabel *outcomes* digunakan untuk melihat hasil dari proses kolaborasi tersebut.

Di sisi lain, dalam konteks pelaku usaha, khususnya pedagang pasar tradisional, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi kemampuan mereka

dalam mengembangkan usaha. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan kapasitas usaha dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti persaingan dengan pasar modern dan e-commerce, serta perubahan perilaku konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis Peterongan dianalisis melalui pendekatan *collaborative governance*, dengan melihat interaksi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Sementara itu, hambatan pengembangan usaha pedagang dianalisis sebagai faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi di kawasan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memahami dua hal utama, yaitu bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan kawasan berlangsung, serta bagaimana hambatan yang dihadapi pedagang mempengaruhi perkembangan usaha di kawasan tersebut.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007)		
Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
<i>Collaborative Governance</i>	<i>Starting Conditions</i>	- Ketimpangan peran antara pemerintah dan pedagang - Tingkat kepercayaan awal antar aktor - Adanya ketergantungan antar aktor dalam pengelolaan kawasan
	<i>Institutional Design</i>	- Kejelasan aturan dalam pengelolaan Kawasan - Keterbukaan akses partisipasi bagi pedagang/Masyarakat

		- Transparansi kebijakan dan pengelolaan
	<i>Collaborative Process</i>	- Intensitas komunikasi antara pemerintah dan pedagang - Adanya forum/dialog Bersama - Upaya membangun kepercayaan - Komitmen aktor dalam pengelolaan kawasan
	<i>Outcomes</i>	- Dampak kebijakan terhadap pedagang - Perubahan kondisi ekonomi kawasan - Tingkat kepuasan pelaku usaha
Hambatan Pengembangan Usaha Pedagang		
Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
Hambatan Usaha Pedagang	Faktor Intenal	- Keterbatasan kemampuan manajemen usaha - Keterbatasan inovasi produk - Rendahnya literasi digital - Keterbatasan akses teknologi
	Faktor Eksternal	- Persaingan dengan pasar modern - Persaingan dengan <i>e-commerce</i> - Perubahan perilaku konsumen

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2024)

1.8 Metode Penelitian

Metode secara umum diartikan sebagai prosedur terstruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara untuk penyampaian suatu nilai tertentu (Fadilah, 2019). Metode penelitian membantu penulis dengan adanya kerangka kerja yang menjadi sistematis dan terstruktur untuk melakukan penelitian. Metode juga memudahkan penulis untuk mengikuti prosedur yang jelas dari perumusan masalah hingga pengumpulan dan analisis data, sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan penelitian.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2017), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penulis mencari data berdasarkan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh harus mendetail dan relevan yang mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat. Peneliti akan menggali pengalaman dari subjek penelitian secara subjektif dan menggali bagaimana dinamika sosial budaya yang mempengaruhi perilaku dari subjek penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Peterongan Kota Semarang yang termasuk salah satu kawasan ekonomi strategis di Semarang dan di Pemerintah Daerah Kota Semarang. Penelitian ini berfokus pada titik titik yang menjadi sumber kegiatan ekonomi di Peterongan, yaitu Pasar Peterongan. Peneliti akan menganalisis di daerah Pasar Peterongan, kios usaha UMKM dan pekerjaan warga Peterongan. Dari banyaknya tempat yang dipilih oleh penulis, diharapkan dapat mendapatkan data yang detail dan gambaran yang jelas dari para informan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, kelompok, atau entitas yang memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian. Subjek penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Terdapat subjek penelitian di dalam penelitian penulis yang meliputi:

a. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang menjadi salah satu subjek utama dalam penelitian ini karena, Pemerintahan Daerah Kota Semarang yang memiliki kewenangan mengelola kawasan Peterongan. Pemerintahan Daerah Kota Semarang juga sudah melakukan revitalisasi Pasar Rakyat Peterongan pada tahun 2017 silam.

b. Pelaku usaha / wirausahawan UMKM Peterongan

Pelaku usaha menjadi salah satu subjek penelitian terpenting dalam penelitian penulis. Pemilihan subjek tersebut dilandaskan pada penerima manfaat secara langsung atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengelolaan Kawasan ekonomi setrategis di wilayah Peterongan Kota Semarang.

c. Warga penduduk daerah Peterongan

Salah satu subjek penelitian terpenting yang lain adalah warga penduduk Peterongan. Penulis akan menganalisis mengenai apa saja dampak yang penduduk karena tinggal di kawasan ekonomi strategis yang ramai menjadi tempat perdagangan.

1.8.4 Jenis Data

Penulis menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana Dinas Perdagangan Kota Semarang mengelola Kawasan ekonomi di Peterongan tahun 2024. Data yang didapatkan dari subjek penelitian akan dituangkan ke dalam pembahasan di penelitian penulis.

1.8.5 Sumber Data

Data yang berada didalam penelitian harus berupa data yang dapat dijamin kebenarannya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder sebagai data yang membuktikan kevalidan dari penelitian ini.

a. Data Primer

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber, data yang diperoleh dapat melalui wawancara, observasi, atau pengisian kuesioner. Arikunto (2013) mendefinisikan data primer sebagai data yang didapatkan dengan berinteraksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, baik dalam bentuk verbal maupun perilaku. Data primer pada penelitian ini diperoleh oleh penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Penulis mengobservasi dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian dan mengumpulkan hasil yang berupa audio dan visual. Observasi untuk mengetahui lebih dalam secara mendetail sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan. Observasi oleh peneliti juga bertujuan untuk mengamati perilaku dan interaksi terhadap subjek penelitian secara alami. Kemudian, data yang didapatkan penulis saat wawancara akan diolah.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, data sekunder didapatkan dari perantara seperti individu atau dokumen. Data sekunder menurut Kuncoro (2009) adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang relevan dengan data yang dicari oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini tidak

diperoleh secara langsung oleh peneliti. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari buku, media, artikel, dan jurnal. Peneliti juga memperoleh data berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini menjadi data yang mendukung mengapa penulis melakukan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Matthew dan Ross (2010) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. Berdasarkan pernyataan Matthew dan Ross, indra manusia menjadi perangkat utama dalam observasi. Bukan hanya indra penglihatan saja yang berperan, terdapat indra penciuman, indra pendengaran, dan lainnya. Indra manusia menjadi perangkat utama dalam melakukan observasi karena kemampuan untuk melihat menggunakan indra penglihatan, mendengar menggunakan indra pendengaran, dan ada juga objek yang diamati melalui indra perasa, seperti mengamati perubahan suhu yang dapat menjadi hasil pengamatan peneliti.

b. Wawancara terstruktur

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan yang diberikan kepada subjek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten dan valid. Penulis menyiapkan pertanyaan yang terstruktur untuk diberikan ke subjek penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kualitatif, dan observasi kualitatif. Penulis akan melakukan wawancara kepada subjek penelitian hingga pertanyaan terjawab dengan tuntas.

c. Sumber literatur

Artikel, media dan jurnal penelitian terdahulu yang diperoleh penulis dapat dijadikan sebagai landasan teori yang mendukung penulis untuk menganalisis pengelolaan dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola Kawasan ekonomi strategis.

d. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan salah satu data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian dapat menjadi bukti bahwa data yang diperoleh adalah data yang empiris dan tidak dimanipulasi. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai bahan penelitian; informasi yang terdokumentasi dapat digunakan untuk analisis tambahan atau sebagai referensi dalam studi-studi yang akan datang. Dengan adanya dokumentasi, proses dan hasil penelitian, integritas dan keaslian informasi dapat dijaga, sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penulis menggunakan tiga komponen dalam analisis dan interpretasi data yaitu dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan seperti yang dinyatakan oleh Miles & Huberman (2007). Salah satu bagian dari analisis data di penelitian ini adalah reduksi data, yang juga dapat didefinisikan sebagai proses menghilangkan data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang memungkinkan untuk mendapatkan atau bahkan memverifikasi kesimpulan akhir. Proses reduksi data dan berbagai transformasinya ini berlanjut sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. Lalu ada penyajian data yang merupakan tahap penting

dalam proses menganalisis data, yang bertujuan untuk menyusun dan menampilkan informasi yang telah dikumpulkan sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti contohnya narasi, grafik, dan tabel. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data, yang bertujuan untuk memberikan interpretasi hasil penelitian. Pada tahap ini melibatkan pengolahan data yang diperoleh dari proses reduksi dan penyajian data, sehingga peneliti dapat memahami makna dan pola yang muncul dari data.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data adalah istilah yang mengacu pada pengembangan dan pelaksanaan tindakan yang menggunakan teknik manajemen kualitas pada data dengan tujuan memastikan bahwa data sesuai untuk memenuhi tujuan khusus. Penulis mengumpulkan data secara triangulasi sebagai sumber pencarian data yang valid, dan melakukan pengujian apakah data yang diperoleh merupakan data yang valid dan kredibel (Rustandi, 2020).

Triangulasi dilakukan dengan melakukan perbandingan data dan informasi dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau mereka dapat menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Peneliti juga dapat menggunakan informan lebih dari satu dalam memastikan kebenaran informasi tersebut. Perspektif dan pandangan berbeda yang

diterima, diharapkan dapat memperoleh jawaban yang mendekati dengan kebenaran (Rahardjo, 2010).